

TANTANGAN DAN STRATEGI RAPBN 2022 DALAM MERESPONS KETIDAKPASTIAN

19

Ariesy Tri Mauleny

Abstrak

Nota Keuangan dan RUU APBN Tahun Anggaran 2022 memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,0-5,5% dengan defisit dijaga 4,85%. Kisaran tersebut dianggap terlalu muluk di tengah tantangan ketidakpastian pandemi Covid-19 dan divergensi kondisi global. Namun sinyal positif muncul ketika pertumbuhan ekonomi pada Q2-2021 mencapai 7,07% sebelum dihantam kembali oleh gelombang kedua pandemi yang memaksa pemerintah memberlakukan kembali PPKM Darurat. Kondisi ini menuntut strategi, sinergi, koordinasi dan konsolidasi, bukan saja antara DPR RI dan Pemerintah, tetapi juga antardaerah, lintas sektoral hingga ke struktur terkecil masyarakat. APBN dapat menjadi instrumen countercyclical yang optimal dalam mengatasi pandemi, mengakselerasi pemulihan ekonomi serta mempercepat reformasi struktural menuju APBN sehat dan berkelanjutan melalui program perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak, insentif bagi keberlanjutan dunia usaha dan iklim investasi, penguatan ekspor, infrastruktur konektivitas, dan peningkatan produktivitas ekonomi strategis dengan multiplier effect tinggi dilakukan dengan serius dengan tetap memperhatikan risiko dan keberlanjutan fiskal. Keseriusan dukungan DPR RI bukan hanya di awal pandemi, dengan disahkannya UU 2/2020 dan UU Cipta Kerja, tetapi hingga kini melalui fungsi anggaran dan fungsi pengawasan untuk memastikan pilihan kebijakan Pemerintah tepat dilakukan dan dapat terimplementasi sesuai sasaran.

Pendahuluan

Presiden RI menyampaikan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya, dalam Rapat Paripurna DPR RI, 16 Agustus 2021. Penyampaian RAPBN 2022 di tengah gelombang kedua pandemi Covid-19. Kondisi yang memaksa pemerintah kembali mengeluarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

(PPKM) Darurat, mengingat kasus harian mencapai 56 ribu dengan tingkat kematian tertinggi. Kondisi ini dikhawatirkan masih membayangi Indonesia beberapa tahun ke depan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memprediksi pandemi belum berakhir hingga tahun 2022. Indonesia harus mengambil *adjustment* dari situasi pandemi menuju endemi. Situasi yang memaksa setiap orang menuju kebiasaan baru



(*living with endemic*) dengan terus mengendalikan penularan dan melindungi masyarakat. Belum lagi, risiko kecepatan pemulihan yang tidak merata antarnegara berpotensi melahirkan divergensi global seperti rebound pertumbuhan ekonomi di sebagian besar negara G20 serta ASEAN pada Q2-2021 (Siaran Pers NK dan RUU APBN 2022, 16 Agustus 2021).

Di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, pemerintah tetap optimis merencanakan kebijakan fiskal ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Termasuk upaya konsolidatif dalam menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural agar berkelanjutan. Tulisan ini mengkaji fokus kebijakan, kapasitas dan ketahanan fiskal RAPBN 2022 sebagai instrumen *countercyclical*, serta apa saja tantangan yang dapat membatasi ruang gerak fiskal dan bagaimana strategi untuk mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan.

Fokus Utama RAPBN 2022

Terdapat enam fokus utama RAPBN 2022 yang disusun dengan mempertimbangkan darurat pengendalian pandemi di tengah kebijakan fiskal ekspansif (nasional. kompas.com, 16 Agustus 2021). **Pertama**, memprioritaskan sektor kesehatan melalui percepatan pengendalian pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan *stunting*, dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Terlihat dari kenaikan 3,2% anggaran kesehatan menjadi Rp255,3 triliun (9,4%) jika dibandingkan APBN 2021 sebesar Rp169,72 triliun (6,2%). **Kedua**,

melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga dapat memotong rantai kemiskinan. Anggaran perlindungan sosial direncanakan Rp427,5 triliun atau 15,7% dari belanja negara. Kebijakan ini belum termasuk subsidi baik energi maupun non-energi. **Ketiga**, mewujudkan SDM yang unggul, berintegritas dan berdaya saing melalui alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun atau tetap 20% dari APBN sesuai dengan amanat konstitusi meski dalam situasi penanggulangan pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi. **Keempat**, melanjutkan program pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi sebesar Rp384,8 triliun (14,2%) atau turun 8,59% dari anggaran tahun 2021 sebesar Rp417,8 triliun. **Kelima**, penguatan desentralisasi fiskal untuk pemerataan kesejahteraan antardaerah diproyeksi sebesar Rp770,4 triliun (28,4%), meningkat Rp141,3 triliun dibandingkan *Outlook* Tahun 2021. Kebijakan diarahkan untuk peningkatan kinerja daerah dalam pemulihan ekonomi, penanganan pandemi dan penguatan sektor prioritas daerah (Siaran Pers NK dan RUU APBN 2022, 16 Agustus 2021). **Keenam**, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan *zero based budgeting* untuk efisiensi belanja, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian. Untuk itu, pilihan pengurangan belanja pemerintah pusat dalam *refocusing* RAPBN 2022 direspons positif oleh DPR RI sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan

prioritas pengendalian pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi.

Capaian fokus utama RAPBN 2022 di atas, sangat tergantung pada kemampuan kinerja SDM dan kapasitas kelembagaan di pusat dan daerah dalam interpretasi dan implementasi detail rincian kebijakan turunannya. Beberapa poin penting yang tidak boleh luput dalam pengawasan misalnya perluasan vaksinasi sehingga terbentuk *herd immunity*, ketersediaan obat dan fasilitas kesehatan lainnya, serta *update database* secara berkala dan berkesinambungan dengan pemanfaatan teknologi, baik data vaksinasi, masyarakat rentan maupun dunia usaha. Selain ketersediaan data yang benar, pengawasan dan evaluasi perlu dilakukan dalam mekanisme penyelenggaraan maupun distribusinya. Dengan begitu, penanggulangan pandemi, perlindungan sosial masyarakat

rentan, dan insentif bagi dunia usaha diharapkan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi.

Postur RAPBN 2022 dan Target Pertumbuhan Ekonomi

Banyak negara melakukan kebijakan *countercyclical* dalam upaya memulihkan ekonomi, termasuk Indonesia. RAPBN 2022 sebagai instrumen fiskal berperan strategis dalam mengatasi pandemi Covid-19, mengakselerasi pemulihan ekonomi, dan melakukan reformasi struktural. Hingga semester I-2021, kebijakan pemerintah terbilang cukup efektif dalam mendorong pemulihan ekonomi, dengan tetap mengedepankan perlindungan masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.

RAPBN 2022 didesain antisipatif, responsif dan fleksibel merespons ketidakpastian pandemi, namun

Tabel 1. Postur APBN 2019-2021, Outlook 2021 dan RAPBN 2022 (Triliun Rp)

Postur APBN		2019		2020		2021		2022
		APBN	LKPP	APBN	LKPP	APBN	Outlook	RAPBN
A	Pendapatan Negara	2165,1	1960,6	2233,2	1699,9	1743,6	1735,7	1840,7
	I. Pendapatan dalam negeri	2164,7	1955,1	2232,7	1698,6	1742,7	1733,0	1840,1
	1. Penerimaan Perpajakan	1786,4	1546,1	1865,7	1404,5	1444,5	1375,8	1506,9
	2. PNBPN	378,3	409,0	367,0	294,1	298,2	357,2	333,2
	II. Penerimaan hibah	0,4	0,5	0,5	1,3	0,9	2,7	0,6
B	Belanja Negara	2461,1	2309,3	2540,4	2739,2	2750,0	2697,2	2708,7
	I. Belanja pemerintah pusat	1634,3	1496,3	1683,5	1975,2	1954,5	1927,0	1938,3
	1. Belanja K/L	855,4	873,4	909,6	836,4	1032,0	1059,4	940,6
	2. Belanja Non K/L	778,9	622,9	773,9	1138,9	922,6	867,5	997,7
	II. Transfer dana desa	826,8	813,0	856,9	762,5	795,5	770,3	770,4
	1. Transfer ke daerah	756,8	743,2	784,9	692,7	723,5	698,4	702,4
	2. Dana desa	70,0	69,8	72,0	71,2	72,0	71,9	68,0
C	Keseimbangan Primer	-20,1	-73,1	-12,0	-633,6	-633,1	-595,3	-462,2
D	Surplus (Defisit)	-296,0	-348,7	-307,2	-947,7	-1006,4	-961,5	-868,0
E	Pembiayaan	296,0	348,7	307,2	947,7	1006,4	961,5	868,0
	Pertumbuhan Ekonomi	5,3	5,0	5,3	-2,1	5,0	3,1	5,0-5,5
	% Defisit Terhadap PDB		2,20%		6,14%		5,82%	4,85%

Sumber: Diolah dari Data APBN (kemenkeu.go.id).

tetap mencerminkan optimisme dan kewaspadaan. Terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan pada kisaran 5,0-5,5% dengan defisit dijaga 4,85% dari PDB. (Tabel 3). Besaran defisit tersebut terus diturunkan perlahan sejak kenaikannya di tahun 2020 (6,14%) agar konsolidasi fiskal di tahun 2023 dapat tercapai. Mengingat defisit lebih dari 3% hanya diijinkan dalam kurun waktu 2020-2022 untuk penanganan pandemi sesuai UU 2/2020 (Kompas, 18 Agustus 2021). Meski demikian, kebijakan defisit 4,85% dinilai masih terlalu lebar sehingga berisiko. Apalagi capaian pendapatan negara dalam 3 tahun terakhir (2018-2020) masih di bawah target (ekonomi.bisnis.com, 18 Agustus 2021).

Target pertumbuhan ekonomi 5,0-5,5% harus didukung strategi yang tepat, sehingga pemburukan ekonomi bisa diantisipasi. Khususnya ketika melihat ancaman gelombang kedua pandemi pada awal Q3-2021 lalu, terjadi di saat sinyal positif pertumbuhan ekonomi pada Q2-2021 mencapai 7,07%. Kondisi tersebut tidak bisa diatasi hanya dengan pemberlakuan PPKM saja, tetapi harus diikuti efektivitas perluasan cakupan perlindungan sosial dan pemberian insentif usaha.

Tantangan RAPBN 2022: Anggaran Sehat dan Berkelanjutan

APBN memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi bagi perekonomian sekaligus bersifat *countercyclical*. Artinya, pada saat perekonomian 'boom' pemerintah menjalankan anggaran surplus dan ketika 'resesi/krisis', pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal dengan anggaran defisit. Pada akhirnya APBN

akan menuju seimbang, sehat dan berkelanjutan dalam suatu periode jangka panjang siklus ekonomi, yang ditandai dengan defisit terkendali, keseimbangan primer terjaga dan rasio utang yang cenderung menurun. Hal ini tentu tidak mudah, apalagi jika ada guncangan atau ketidakpastian dalam perekonomian.

Tantangan RAPBN 2022 dapat bersumber dari ketidakpastian global dan domestik. Ketidakpastian global dipicu oleh: 1) Pemulihan ekonomi global yang tidak merata akibat perbedaan kondisi di berbagai negara sehingga terjadi gesekan divergensi tren kebijakan; 2) Ancaman perubahan iklim; 3) Peningkatan dinamika geopolitik.

Sementara ketidakpastian domestik di antaranya: 1) Perubahan kondisi dinamis pandemi yang masih berlangsung cepat; 2) masih lebar dan beresikonya kisaran defisit anggaran 4,85%; 3) Defisit anggaran melebihi 3% yang berpotensi meningkatkan rasio utang terhadap PDB; 4) Pergeseran asumsi ekonomi makro; 5) Meningkatnya angka pengangguran; 6) Jurang ketimpangan yang cukup dalam; 7) Investasi yang belum terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa catatan DPR RI untuk Pemerintah: 1) Memantapkan keberlanjutan pemulihan dan transformasi ekonomi dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan; 2) Memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha dengan memperluas insentif, kemudahan berusaha dan iklim investasi. 3) Meningkatkan daya saing dan produktivitas ekspor yang membuka lapangan pekerjaan; 4) Menciptakan SDM Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan adaptif terhadap teknologi informasi; 5)

Memastikan terwujudnya reformasi pengelolaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan layanan publik; 6) Merealisasikan berbagai target makroekonomi dan target pembangunan yang telah disepakati bersama antara DPR RI dengan Pemerintah; 7) Pemberian insentif fiskal lebih terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis yang memiliki *multiplier effect* tinggi; 8) Mengoptimalkan penerimaan pajak pada aktivitas ekonomi berbasis digital; 9) Memperhatikan risiko dan keberlanjutan fiskal, dengan berhati-hati dalam mengatasi pelebaran defisit melalui utang; 10) Pengelolaan fiskal dilakukan secara *prudent*, efisien, dan *sustainable*, sehingga tercapai konsolidasi fiskal yang optimal pada tahun 2023.

Sepuluh catatan di atas sangat tergantung pada kemampuan dan kapasitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, struktur desa sampai dengan struktur terkecil masyarakat yaitu pengurus RT/RW dalam mengeksekusi rincian aktivitas turunan dari program kerja RAPBN 2022. Tidak kalah penting lagi partisipasi masyarakat dalam mengajukan atau mengawasi praktek di lapangan. DPR RI pun perlu memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai target, melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang seluruhnya dilakukan dalam kerangka representasi masyarakat.

Penutup

Enam fokus utama RAPBN 2022 meliputi pengendalian pandemi, perlindungan sosial, penguatan SDM, pembangunan infrastruktur,

penguatan desentralisasi fiskal, dan reformasi penganggaran. Capaian fokus utama tersebut sangat bergantung pada kapasitas dan ketahanan postur RAPBN 2022 sebagai instrumen *countercyclical* yang memerhatikan risiko dan keberlanjutan fiskal, sehingga terwujud APBN yang sehat dan berkelanjutan.

Target pertumbuhan ekonomi 5,0-5,5% dan defisit anggaran 4,85% dibutuhkan untuk menuju konsolidasi fiskal tahun 2023. Diperlukan dukungan perlindungan sosial bagi terdampak, insentif bagi keberlanjutan dunia usaha, iklim investasi, penguatan ekspor, perluasan infrastruktur layanan dasar, penguatan infrastruktur konektivitas dan mobilitas yang memperbesar produktivitas ekonomi strategis yang memiliki *multiplier effect* tinggi.

Kemampuan dan kapasitas pemerintah pusat, pemerintah lintas daerah, lintas sektor, struktur desa sampai dengan struktur terkecil masyarakat yaitu RT/RW sangat menentukan keberhasilan kebijakan yang diusung RAPBN 2022. Di samping itu perlu sinergi DPR RI dan Pemerintah dalam mengefektifkan proses checks & balances untuk optimalisasi APBN yang sehat dan berkelanjutan.

Referensi

"Data APBN", <https://www.kemenkeu.go.id/dataapbn>, diakses 18 Agustus 2021.

"Jokowi Sampaikan 6 Fokus APBN 2022: Penanganan Pandemi hingga Infrastruktur" <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/16/11370301/jokowi-sampaikan-6-fokus-apbn-2022-penanganan-pandemi-hingga-infrastruktur?>, diakses 19

Agustus 2021.
"Konsolidasi Fiskal Jadi Tantangan",
Kompas, 18 Agustus 2021, hal. 1
Pidato Pembukaan MS I Ketua DPR RI,
16 Agustus 2021.
Siaran Pers Nota Keuangan dan RUU
APBN 2022, 16 Agustus 2021.

"Target Defisit APBN 2022 Dianggap
Masih Lebar dan Berisiko",
[https://ekonomi.bisnis.com/
read/20210817/9/1430643/target-
defisit-apbn-2022-dianggap-masih-
lebar-berisiko-anggota-dpr-buka-
suara](https://ekonomi.bisnis.com/read/20210817/9/1430643/target-defisit-apbn-2022-dianggap-masih-lebar-berisiko-anggota-dpr-buka-suara), diakses 19 Agustus 2021.



Ariesy Tri Mauleny
ariesy.mauleny@dpr.go.id.

Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E., Menyelesaikan Pendidikan Doktor Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (2019), Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, kekhususan Keuangan Pusat dan Daerah, FEB UI (2007) dan Sarjana Sains di FMIPA UI (1997). Bekerja sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dengan Kepakaran Kebijakan Ekonomi. Beberapa karya tulis ilmiah yang sudah dipublikasikan antara lain: Penguatan Ekosistem Logistik untuk Daya Saing Indonesia (2020), Redesain Pembangunan Ekonomi Kelautan Indonesia (2019), Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia (2018), Analisis Empiris Koperasi Indonesia (2018), Pemberdayaan UMKM dan Perekonomian Nasional: Perspektif Penjaminan (2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.